

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dideskripsikan pada Bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan aparat Desa terhadap perancangan peraturan Desa Limbatihu telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundang-Undangan dalam Hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta prinsip Kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan berkualitas. Selain itu bertujuan untuk memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat sehingga Masyarakat dan aparat desa pun akan merasakan Pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan Desa yang merujuk pada perancangan peraturan desa. Pola Kerjasama Pemerintah dan Bada Permusyawaratan Desa Limbatihu dalam peningkatan kerjasama juga berbeda dengan desa lain pada umumnya yakni dengan menerapkan 3 (tiga) pola kerjasama yaitu Pemanfaatan budaya gotong royong dalam lingkungan masyarakat, penyusunan perencanaan dalam menjaring masalah dengan melibatkan masyarakat, dan melakukan sosialisasi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan Aparat Desa terhadap perancangan peraturan desa setelah melakukan penelitian serta pengamatan langsung dan memperhatikan keterangan-

keterangan dari narasumber dan informan, hal yang menyebabkan terkendalanya peningkatan partisipasi tersebut dikarenakan :

- a. Sosialisasi yang kurang efektif dan menyeluruh yang dilakukan Pemerintah Desa dan BPD kepada masyarakat dan Aparat Desa terhadap pentingnya perancangan peraturan desa.
- b. Apatisme beberapa masyarakat dan Aparat Desa terhadap Apapun yang berhubungan dengan pembangunan terutama dalam hal perncangan peraturan desa yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan tuntutan ekonomi
- c. Tingkat Pendidikan Pemerintah Desa dan BPD yang menyebabkan kedua unsur lembaga tersebut mengalami kesulitan dalam memahami dan menjelaskan materi yang berhubungan dengan Perancangan Peraturan Desa.
- d. Kepemimpinan Kepala Desa yang belum sepenuhnya dapat merespon keluhan-keluhan dari masyarakat sehingga menyebabkan sebagian masyarakat serta aparat kurang termotivasi dalam berpartisipasi.
- e. Keahlian Penyelenggara Pemerintahan Desa dalam hal ini Pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa dalam memiliki skill dan kemampuan dalam merancang peraturan Desa serta kemampuan dan dalam menggunakan fasilitas teknologi yang ada.

## 5.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan BPD dalam hal kerjasama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan aparat khususnya Perancangan Peraturan Desa, Maka sebaiknya :

1. Pemerintah Desa dan BPD hendaknya lebih meningkatkan Koordinasi satu sama lain, agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa tidak terhambat terutama yang berhubungan Regulasi dalam pemerintahan desa.
2. Komposisi dari BPD setidaknya di satu atau dua orang sarjana terutama sarjana Hukum agar lebih berkompeten dalam merancang peraturan desa.
3. Demi terselenggaranya kehidupan masyarakat yang sejahtera, perlu adanya hubungan komunikasi yang baik antara Unsur Penyelenggara Desa dengan masyarakat dan aparat, agar masyarakat dan aparat tersebut dapat dengan mudah menyampaikan keluhan dan aspirasinya. Sehingga perlu ditingkatkan pola hubungan komunikasi secara intensif dan terkoordinasi dengan terjun langsung ke lapangan ke tengah masyarakat untuk mendengar keluhan-keluhan masyarakat dan aparat secara langsung lalu menerapkan atau merealisasikan apa yang diharapkan oleh masyarakat tersebut.
4. Masyarakat Limbatihu kiranya lebih kritis dalam mengamati dan menanggapi setiap program kerja yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD terutama terkait dengan regulasi-regulasi yang akan

diterapkan di Desa Limbatihu lalu menyampaikan segala apapun yang dirasa keliru dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggrowati Puput, 2015. "*Pelaksanaan Gotong Royong di Era Global*" Jurnal Kajian Moral Vol 01 No 03.
- Anwar Khaeri, 2014. "*Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*". Jurnal IUS. Yayasan Arrahman Pringgarata.
- Asyari, Sapari Imam. 1993. "*Sosiologi Kota dan Desa. Surabaya*": Usaha Nasional.
- Azhar Fikri, 2015. "*Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBEG)*" Jurnal Kebijakan Manajemen Publik, Vol 3. No 2.
- Bahrudin agus, 2015, "*Pola Hubungan Pemerintahan Desa Dan Parlemen Desa Menuju Good Governance*", Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang,
- Danial, 2009. "*Metode Penulisan Karya Ilmiah*". Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Eka Yuliana, 2013. "*Peranan Kepala Adat Dalam Sosialisasi Program Keluarga Berencana Di Pampang Keluarga Sungai Siring Samarinda*" Ejournal Ilmu Komunikasi, Vol 1. No 1,
- Fajar Mukti, Achmad Yulianto. 2015. "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*". Cetakan Ke-III Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- HAW Widjaja. 2003. "*Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*", Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada.
- Huda Ni'matul, 2015. "*Hukum Pemerintahan Desa (dalam konstitusi indonesia sejak kemerdekaan hingga era reformasi)*" Malang. Setara Press.
- Khairuddin. 2000. "*Pembangunan Masyarakat*". Tinjauan Aspek: Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan. Liberty, Yogyakarta.
- Khairudin, 2003." *Pembangunan Masyarakat*", Yogyakarta: Liberty.
- Kusumaputra Ardhiwinda, prasetyo ngesti, Al-Uyun Dhia, 2014. "*Model Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Struktur Pemerintahan Desa*". dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Latif Abdul, 2014. "*Peran Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Posigadan*". dalam Jurnal Partisipatif.
- Nudraha, Talaziduhu. 2002. "*Pembangunan Masyarakat*", Jakarta, Rineka Cipta.

- Rasji. 2016, "*Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Dan Surat Keputusan Desa Argamukti Kabupaten Majalengka*" Seminar Nasional hasil penelitian dalam Pengabdian pada masyarakat.
- Soemantri B Trisantono, 2011. "*Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan desa*". Bandung: Fokusmedia.
- Soekanto Soerjono, 1983. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: UI Press.
- Soetomo, 2012. "*Pembangunan Masyarakat (merangkai sebuah kerangka)*". Cetakan Ke-II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Solekhan Moch, 2014. "*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis Partisipasi Masyarakat*". Malang: Setara Pres.
- Sugiyono, 2008. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*". Bandung:: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. "*Memahami Penelitian Kualitatif*". Bandung:: Alfabeta.
- Suharto Didik, 2016. "*Membangun Kemandirian Desa ((perbandingan UU No.5/1979, UU No. 22/1999, & UU No.32/2004 serta prespektif UU No. 6/2014)*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yenny, 2016, "*Prinsip-Prinsip Good Governance (studi tentang penerapan prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda)*" Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 1 No.2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- <http://www.berpendidikan.com/2015/06/pengertian-kerja-sama-dan-bentuknya-beserta-contohnya.html>.
- <http://fgbmfi.web.id/2013-07-06-04-08-39/artikel/marketplace/2807-pentingnya-komunikasi-dalam-membangun-kerjasama-tim.html>.
- <http://restyucul.blogspot.co.id/2011/04/pentingnya-kerjasama-dalam-organisasi.html>.
- <http://www.artikelsiana.com/2015/06/bentuk-interaksi-sosial-asosiatif-disosiatif-bentuk.html#>
- H.Cooley, Pengertian Kerja Sama, <http://artikel-az.com/pengertian-kerja-sama/>.
- <http://nikmonmd.blogspot.co.id/2013/07/penyusunan-peraturan-desa.html>.
- akse<http://artikel-az.com/pengertian-kerja-sama/>.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Limbatihu. Kecamatan paguyaman Pantai, kabupaten Boalemo, tahun 2016-2022

Profil Desa Limbatihu, kecamatan paguyaman pantai, kabupaten boalemo, Tahun 2017.

Badan Permusyawaratan Desa Limbatihu, kecamatan paguyaman pantai kabupaten boalemo Tahun 2017